

BAB I

PENDAHULUAN

I1 Latar Belakang

Standar akuntansi di Indonesia (PSAK) diarahkan untuk semakin menyamai standar akuntansi internasional (IFRS) dalam beberapa tahun ke depan. Berbagai kajian serta revisi atas standar akuntansi yang telah berlaku terus dilakukan oleh para pembuat kebijakan akuntansi di Indonesia agar PSAK semakin selaras dengan IFRS. Dalam penyelarasan PSAK dan IFRS ini, praktek konservatisme menjadi salah satu isu yang menarik untuk dikaji lebih mendalam.

Konservatisme merupakan prinsip yang banyak menuai kontroversi. Berbagai kritik muncul pada praktek konservatisme karena pencatatan laporan keuangan perusahaan yang menggunakan prinsip tersebut cenderung menghasilkan nilai laba dan asset yang bias serta mengalami *understatement*.

PSAK maupun IFRS tidak mengatur secara jelas penerapan prinsip konservatisme. IFRS tidak secara ekspilisit mengatur penerapan prinsip ini karena prinsip ini tidak sesuai dengan kerangka konseptual IFRS. Hellman (2007) menyatakan bahwa laporan keuangan yang dibuat berdasarkan IFRS haruslah dapat dipahami, relevan, dapat diandalkan, dapat dibandingkan serta tanpa bias konservatif.

Meskipun menuai banyak kontroversi, konservatisme telah menjadi prinsip yang banyak dianut oleh para akuntan di seluruh dunia sejak abad ke-15 dan semakin populer penggunaannya dalam tiga dekade terakhir. Sedikitnya ruang bagi penerapan prinsip ini dalam IFRS tidak berarti prinsip ini tidak lagi diterapkan oleh para akuntan. Berbagai kondisi ketidakpastian di dalam perusahaan menjadi salah satu pemicu tumbuhnya praktek konservatisme. Terlebih lagi, konservatisme telah menjadi budaya yang tidak terlepas dari akuntan di seluruh dunia saat ini. Tetapi, dapat disimpulkan bahwa para pembuat kebijakan akuntansi Internasional semakin melangkah lebih jauh untuk meninggalkan praktek konservatisme yang telah populer sejak berabad-abad yang lalu.

Berbeda dengan IFRS, PSAK memberikan ruang yang lebih besar bagi para akuntan untuk membuat laporan keuangan yang konservatif. Di antaranya dengan masih digunakannya prinsip biaya historis serta pendekatan laporan keuangan dalam penghitungan pendapatan dan beban. Meskipun konservatisme tidak diatur dalam PSAK, timbul pertanyaan yang menarik untuk didalami. Apakah konservatisme eksis dalam pelaporan keuangan perusahaan-perusahaan publik di Indonesia? Jika pertanyaan tersebut terbukti benar, maka hal tersebut haruslah ditinjau lebih mendalam oleh para regulator. Dalam hal ini, bagaimana agar standar akuntansi yang berlaku di Indonesia lebih selaras dengan standar Internasional (IFRS) yang saat ini semakin meninggalkan konservatisme.

Konservatisme, sebagai sebuah prinsip yang digunakan secara luas oleh akuntan di seluruh dunia secara sederhana menekankan pada pemilihan metode pencatatan yang memiliki kemungkinan terkecil untuk meng-*overstate* nilai *asset* dan pendapatan. Dengan kata lain, dalam penerapan prinsip ini, akuntan hanya mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian di masa yang akan datang dan tidak mengantisipasi kemungkinan keuntungan yang mungkin akan diperoleh. Dalam beberapa situasi, Penerapan prinsip konservatisme di dalam sebuah perusahaan menimbulkan terjadinya perbedaan rentang waktu pengakuan *bad news* dan *good news* di dalam laporan keuangan, dimana *bad news* akan diakui lebih cepat daripada *good news*.

Blits (1924) mendefinisikan konservatisme dalam ungkapan "*anticipate no profit but anticipate all losses*" (Watts, 2003, p.208), yaitu dalam penerapan prinsip ini, keuntungan dapat diakui di dalam laporan keuangan setelah perusahaan memperoleh klaim yang sah atas pendapatan yang menghasilkan keuntungan tersebut, sementara kerugian yang terjadi segera diakui. Akuntan cenderung mempersyaratkan tingkat verifikasi yang lebih tinggi untuk pengakuan keuntungan di dalam laporan keuangan daripada kerugian. Lebih jauh, Basu (1997) menginterpretasikan bahwa *earning* yang tercatat di dalam laporan keuangan konservatif merefleksikan *bad news* lebih cepat dibandingkan dengan *good news*.

Perbedaan tingkat verifiabilitas pengakuan *bad news* dan *good news* di dalam laporan keuangan menyebabkan timbulnya perbedaan sistematis dalam periode pengakuan *bad news* dan *good news* dan tingkat persistensi *earning* di dalam laporan keuangan. Sebagai gambaran, perusahaan yang melakukan perubahan atas estimasi masa manfaat aktiva tetap yang dimilikinya, secara ekonomis memperoleh keuntungan jika estimasi masa manfaat baru lebih lama daripada sebelumnya. Namun, dalam ketentuan pencatatan akuntansi berdasarkan biaya historis, tidak ada keuntungan yang dapat dicatat perusahaan saat perubahan estimasi masa manfaat tersebut. Keuntungan ekonomis yang diperoleh perusahaan atas kondisi tersebut baru dapat terlihat setelah beberapa periode laporan keuangan, dimana estimasi masa manfaat baru yang lebih panjang menghasilkan nilai depresiasi yang lebih rendah dan nilai pendapatan perusahaan yang lebih besar.

Berkebalikan dengan kondisi di atas, dalam kondisi estimasi masa manfaat baru dari aktiva tetap perusahaan lebih singkat dari estimasi sebelumnya, biaya depresiasi yang tersisa akan dibebankan pada periode yang lebih singkat dan menghasilkan nilai beban depresiasi yang lebih besar dalam satu periode pelaporan keuangan. Selain itu, nilai depresiasi yang lebih besar saat perubahan estimasi masa manfaat tersebut menurunkan nilai *carrying amount* aktiva tetap yang dimiliki perusahaan sehingga dapat menyebabkan adanya *asset impairment* yang menimbulkan menurunnya nilai pendapatan perusahaan saat itu. Kondisi tersebut menjelaskan bahwa nilai pendapatan yang dilaporkan perusahaan memberikan respon yang lebih cepat terhadap *bad news* daripada *good news*. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada atau tidaknya penerapan konservatisme secara luas oleh para akuntan di Indonesia dapat dilihat dari perbedaan sensitivitas nilai *earning* yang dilaporkan perusahaan terhadap *bad news* dan *good news*.

Dengan latar belakang yang dikemukakan di atas, penelitian ini hendak menguji apakah praktek konservatisme eksis dalam pelaporan keuangan perusahaan publik manufaktur di Indonesia. Pengujian tersebut dilihat dari terjadinya *asymmetric timeliness of earning*, dimana *bad news* terefeksikan lebih cepat di dalam nilai pendapatan yang dilaporkan perusahaan daripada *good news*.

Dengan membuktikan eksistensi konservatisme di Indonesia, selanjutnya penelitian ini hendak menguji faktor-faktor yang memicu timbulnya praktek konservatisme. Watts (2003) menyatakan bahwa kontrak hutang, kontrak kompensasi manajemen, pajak pendapatan, biaya politik serta biaya hukum merupakan faktor-faktor yang menjadi pemicu timbulnya praktek konservatisme. Berbagai penelitian mengenai determinan konservatisme akuntansi di Indonesia telah dilakukan oleh beberapa pihak. Di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Wydia (2004) yang menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan perusahaan terhadap akuntansi konservatif. Ia menemukan bahwa struktur kepemilikan, biaya politik, dan kondisi pertumbuhan perusahaan merupakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap konservatisme, namun ia gagal membuktikan bahwa kontrak utang mempengaruhi pilihan perusahaan pada akuntansi konservatif.

Penelitian terkini yang dilakukan oleh Lasdi (2008) menemukan bahwa kontrak utang, dan biaya hukum secara signifikan mempengaruhi pilihan perusahaan pada pelaporan konservatif. Namun, penelitian ini tidak dapat membuktikan bahwa struktur kepemilikan dan biaya politik memicu digunakannya praktek konservatisme dalam pelaporan keuangan perusahaan publik.

Penelitian oleh Wydia (2004) dan Lasdi (2008) menjadi dasar pemikiran dalam melakukan pengujian terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi pilihan perusahaan terhadap akuntansi konservatif. Perbedaan penelitian ini dari kedua penelitian tersebut adalah dalam variabel-variabel yang menjadi faktor pemicu timbulnya konservatisme. Dalam penelitian ini diuji tingkat *leverage* perusahaan yang diproksikan dengan *debt to equity ratio*, biaya litigasi yang diproksikan dengan *liquidity ratio* dan biaya politik yang diproksikan dengan *net sales*.

I2 Permasalahan Penelitian

Beberapa pertanyaan mendasar yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah prinsip konservatisme digunakan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan perusahaan-perusahaan publik manufaktur di Indonesia?

2. Faktor-faktor apa yang menjadi pendorong timbulnya penerapan konservatisme dalam pencatatan dan pelaporan keuangan perusahaan-perusahaan publik manufaktur di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta perumusan permasalahan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menguji secara empiris eksistensi prinsip konservatisme dalam pelaporan keuangan perusahaan-perusahaan publik manufaktur di Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk menerapkan konservatisme.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membuktikan ada atau tidaknya penerapan prinsip konservatisme dalam pelaporan keuangan perusahaan publik industri manufaktur di Indonesia. Di samping itu, pengujian terhadap faktor-faktor pendorong timbulnya konservatisme akan memberikan bukti empiris dari teori yang menyatakan bahwa hubungan pengontrakan, biaya litigasi dan biaya politik memberikan insentif tersendiri bagi manajemen untuk membuat laporan keuangan konservatif meskipun tidak disyaratkan oleh regulasi yang berlaku.

Pemahaman mengenai determinan konservatisme akuntansi tersebut bermanfaat bagi para akademisi dan regulator akuntansi. Bagi para akademisi bermanfaat untuk memberikan bukti empiris dari kasus di Indonesia atas teori mengenai determinan konservatisme akuntansi. Sementara, para regulator akuntansi dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam upaya pembuatan regulasi akuntansi yang selaras dengan standar akuntansi Internasional (IFRS), dimana saat ini Badan Standar Akuntansi Internasional mengarahkan kebijakannya untuk meninggalkan prinsip konservatisme.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini meliputi pengujian atas dugaan bahwa terdapat praktek konservatisme dalam pelaporan keuangan perusahaan-perusahaan publik industri manufaktur di Indonesia. Praktek konservatisme tersebut dilihat melalui adanya

asymmetric timeliness dari nilai laba yang dilaporkan perusahaan, dimana *bad news* akan terefleksikan lebih cepat dalam nilai *earning* dibandingkan *good news*. Selain itu, penelitian ini juga meliputi pengujian atas beberapa faktor yang diduga menjadi pendorong pemilihan prinsip konservatisme dalam pelaporan keuangan perusahaan publik manufaktur di Indonesia.

1.6 Pembatasan Penelitian

Penelitian ini hanya menguji eksistensi praktek konservatisme serta faktor-faktor pemicunya, antara lain tingkat *leverage*, ukuran perusahaan dan biaya politis dalam pencatatan dan pelaporan keuangan yang dilakukan perusahaan-perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini tidak menguji kelompok industri lainnya serta tidak menguji faktor-faktor pemicu konservatisme selain yang disebutkan di atas.

1.7 Sistematika Penulisan

Tujuan dan beberapa hipotesis penelitian yang telah diajukan di bagian sebelumnya akan dijawab dalam penelitian ini dengan membaginya menjadi lima bab, yaitu :

- a. BAB I PENDAHULUAN, menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, pembatasan penelitian serta sistematika penulisan.
- b. BAB II LANDASAN TEORI, memuat tentang penjelasan landasan teori penelitian serta hasil penelitian sebelumnya yang menjadi dasar penelitian ini.
- c. BAB III METODOLOGI PENULISAN, menjelaskan kerangka berfikir, pendekatan model, estimasi dan data yang digunakan.
- d. BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN, menjelaskan hasil dari proses estimasi yang dilakukan.
- e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, memberikan kesimpulan hasil analisis yang telah dilakukan serta saran-saran untuk perkembangan penelitian selanjutnya.